



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH,  
AGRARIA DAN TATA RUANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NAZIB FAIZAL
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH,  
AGRARIA DAN TATA RUANG
3. NHK : 419238

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 499.000.000

1. MOBIL, HONDA SUV/HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 152.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 7.306.608

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 92.168.278

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.500.974.886

**III. HUTANG** Rp. 869.768.323



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.631.206.563

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.